

# Pengaruh Maturitas SPIP terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dan Implikasinya pada Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Garut)

Tasha Widya Sucitra<sup>1</sup>, Iyeh Supriatna<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012  
E-mail : tasha.widya.amp16@polban.ac.id

<sup>2</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012  
E-mail : iyeh.supriatna@yahoo.ac.id

## ABSTRAK

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk mengukur kualitas dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu tujuan dari sistem pengendalian intern pemerintah adalah tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara. Melalui kinerja instansi pemerintah, penyelenggaraan pemerintah mempunyai tujuan salah satunya untuk memberikan pelayanan publik yang baik. Permasalahan pelayanan publik di Kabupaten Garut selama tiga tahun terakhir belum mampu mencapai target yang telah direncanakan, hal tersebut bisa terjadi karena salah satunya kinerja instansi pemerintah daerah yang belum optimal dan implementasi dari tingkat maturitas SPIP yang belum maksimal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh maturitas sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah dan implikasinya pada pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Garut. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Garut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 25 SKPD dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur dan uji sobel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara langsung, maturitas sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah, kinerja instansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan publik. Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh secara langsung terhadap pelayanan publik, namun secara tidak langsung maturitas sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan publik melalui kinerja instansi pemerintah.

## Kata Kunci

*Maturitas SPIP, Kinerja Instansi Pemerintah, Pelayanan Publik*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam konsep *good governance*, pemerintah berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan optimalisasi penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai *good governance* perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja di Indonesia diatur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bersumber dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) [1].

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, predikat yang diraih Wilayah I hasilnya, 2 pemda meraih predikat A, 20 pemda meraih predikat

BB, sebanyak 73 pemda meraih B, 53 pemda meraih CC, dan masih ada 37 pemda meraih C [2]. Pada tahun 2018 capaian predikat penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Garut mencapai predikat BB dengan nilai sebesar 70,39 poin yang apabila dibandingkan dengan target di tahun 2018 dengan predikat B telah mencapai 111,93% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut meningkat dari tahun 2017 yaitu dengan peringkat B sebesar 67,16 poin yang berarti bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Garut sudah berada pada predikat sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal [3].

Meskipun memperoleh predikat “BB”, dalam penilaian tersebut masih terdapat permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi hal tersebut diketahui dengan survey kepuasan pelanggan dengan maksud untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Indikator persentase peningkatan (IKM) pada tahun 2018 di

Kabupaten Garut tergolong cukup rendah. Selama tiga tahun terakhir realisasi dari indeks kepuasan masyarakat tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2018 indeks kepuasan masyarakat mengalami penurunan sebesar 0,22% dari tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar 2,22% menjadi 2%. Berdasarkan LAKIP 2018, salah satu permasalahan pokok yang masih dihadapi Kabupaten Garut adalah pemenuhan pelayanan publik yang belum optimal yang terdapat pada pelayanan dasar pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial [4].

Sepanjang tahun 2018 diterima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan administrasi publik sebanyak 177 Laporan. Adapun instansi terlapor yang sering diadakan oleh masyarakat adalah pemerintah daerah [5]. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan tanggap terhadap lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan tersebut [6]. Untuk melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, kegiatan pengendalian intern dilakukan melalui pengawasan intern [7].

Terkait dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 buku II, disebutkan pada tahun 2019 tingkat maturitas SPIP harus berada pada level 3 (Terdefinisi). Secara umum penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Garut telah dapat memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi" dengan skor menurut QA (Quality Assurance) sebesar 3,203 [8]. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bupati Garut, dimana hampir 70% pejabat belum paham SPIP. Padahal dengan penerapan SPIP yang baik tidak hanya mampu menghasilkan LKPD yang berkualitas termasuk diraihnya predikat WTP, namun juga mampu menghasilkan kinerja yang efisien dan efektif [9].

Penelitian Dharmawan (2016) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara implementasi sistem pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah. Sementara itu, penelitian Tadeko (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hadian (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang kuat dari kinerja dinas terhadap pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan

mengenai bagaimana pengaruh maturitas SPIP terhadap kinerja instansi pemerintah, pengaruh kinerja instansi pemerintah terhadap pelayanan publik, pengaruh maturitas SPIP terhadap pelayanan publik dan pengaruh maturitas SPIP terhadap pelayanan publik melalui kinerja instansi pemerintah di Pemerintah Kabupaten Garut.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Maturitas SPIP**

#### **2.1.1 Definisi Maturitas Penyelenggaraan SPIP**

Maturitas Sistem Pengendalian Intern merupakan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi. Kualitas sistem pengendalian intern digambarkan melalui kemampuan sistem pengendalian intern dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

#### **2.1.2 Tingkat Maturitas dan Fokus Penilaian Penyelenggaraan SPIP**

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah [11]. Fokus penilaian maturitas SPIP merupakan variabel yang digunakan untuk menunjukkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Variabel tersebut merupakan sub-sub unsur SPIP di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Adapun interval skor tingkat maturitas SPIP terdiri dari belum ada, rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, dan optimum.

### **2.2 Kinerja Instansi Pemerintah**

#### **2.2.1 Definisi dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah**

Kinerja instansi pemerintah adalah kondisi mengenai tingkat pencapaian ataupun tujuan instansi pemerintah dihubungkan dengan visi misi, dan strategi instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Aspek yang mendasar dan paling pokok dari pengukuran kinerja, yaitu menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi, merumuskan indikator kinerja dan ukuran kinerja, mengukur tingkat capaian tujuan dan sasaran organisasi, dan mengevaluasi kinerja [12].

### 2.2.2 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan pengukuran kinerja sektor publik diantaranya adalah mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, menyediakan sarana pembelajaran pegawai, memperbaiki kinerja periode berikutnya memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*, memotivasi pegawai, dan menciptakan akuntabilitas publik [13]. Setelah tujuan dari pengukuran kinerja tercapai maka suatu organisasi akan memperoleh manfaat dari pengukuran kinerja tersebut. Adapun manfaat tersebut adalah memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen [14].

### 2.2.3 Indikator Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator kinerja merupakan sarana atau alat untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses, dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (*ends*) [15].

## 2.3 Pelayanan Publik

### 2.3.1 Definisi Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik [16]. Selanjutnya yang dimaksud dengan pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah kepada masyarakat, dengan pembayaran atau tanpa pembayaran untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat.

### 2.3.2 Asas-Asas dan Prinsip Pelayanan Publik

Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2003 adalah Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan hak, dan Keseimbangan hak dan kewajiban. Prinsip pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2003 adalah Kesederhanaan prosedur, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, kelengkapan sarana dan prasarana, keamanan, tanggung jawab, kemudahan akses, kedisiplinan, dan kenyamanan.

### 2.3.3 Kualitas dan Standar Pelayanan Publik

Pelayanan yang berkualitas perlu beberapa kriteria, diantaranya tepat dan relevan, tersedia dan terjangkau, dapat menjamin rasa keadilan, dapat

diterima, ekonomis dan efisien, dan efektif. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2003 meliputi Prosedur, Waktu penyelesaian, Biaya pelayanan, Produk pelayanan, Sarana dan prasarana, dan Kompetensi petugas pemberi pelayanan.

## 2.4 Penelitian terdahulu

Adapun beberapa penelitian sejenis di antaranya adalah penelitian oleh Lastri Junaedah (2019) dengan judul Pengaruh Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, serta Implementasi *e-Planning* dan *e-Budgeting* terhadap Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penelitian oleh Trianda Nurbaeti (2019) dengan judul Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Implikasinya Pada Pelayanan Publik (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Garut) dan penelitian oleh Dharmawan dkk (2016) dengan judul Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji Kembali pengaruh dari variabel maturitas SPIP, kinerja instansi pemerintah, dan pelayanan publik. Maka dari itu hipotesis yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. H<sub>1</sub>: Maturitas SPIP berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah
2. H<sub>2</sub>: Kinerja instansi pemerintah berpengaruh positif terhadap pelayanan publik
3. H<sub>3</sub>: Maturitas SPIP berpengaruh positif terhadap pelayanan publik
4. H<sub>4</sub>: Maturitas SPIP berpengaruh positif terhadap pelayanan publik melalui kinerja instansi pemerintah

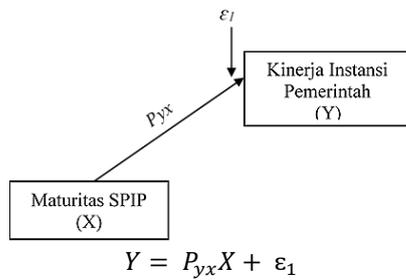
## 3. METODE PENELITIAN

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Penelitian dilakukan terhadap 25 SKPD di Kabupaten Garut, dengan jumlah responden sebanyak 100 responden. Tipe hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah kausal atau sebab-akibat yang menjelaskan tentang hubungan variabel independen (maturitas SPIP) terhadap variabel dependen (pelayanan publik) dengan menggunakan variabel intervening (kinerja instansi pemerintah).

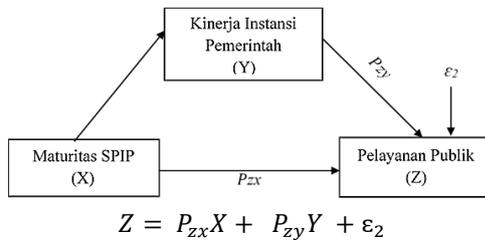
### 3.1 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*).

Sebelum dilakukan analisis terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif dan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas) serta uji korelasi. Untuk menguji keabsahan instrumen penelitian dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas dan untuk menguji hipotesis, dalam analisis jalur dibuat diagram jalur yang terdiri dari substruktur 1 dan substruktur 2 sebagai berikut:



Gambar 1. Sub Struktur Pertama: Diagram Jalur X terhadap Y



Gambar 2. Substruktur Kedua: Diagram Jalur X dan Y terhadap Z

Untuk menguji pengaruh mediasi maka dilakukan Uji Sobel dengan rumus sebagai berikut:

$$SP_{yx}P_{zy} = \sqrt{(P_{zy}^2 SP_{yx}^2) + (P_{yx}^2 SP_{zy}^2) + (SP_{yx}^2 SP_{zy}^2)}$$

Keterangan:

$P_{yx}$  : Koefisien *direct effect* variabel independen terhadap variabel intervening

$P_{zy}$  : Koefisien *direct effect* variabel intervening terhadap variabel dependen

$SP_{yx}$  : Standar error koefisien  $P_{yx}$

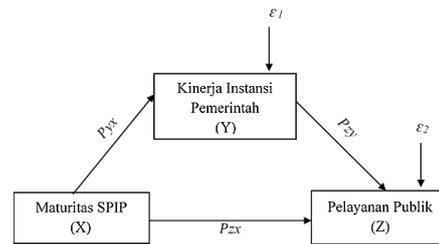
$SP_{zy}$  : Standar error koefisien  $P_{zy}$

Berdasarkan hasil perhitungan dari  $SP_{yx}P_{zy}$ , selanjutnya dihitung nilai t statistik pengaruh mediasi. Nilai statistik uji t diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{P_{yx} \cdot P_{zy}}{SP_{yx} SP_{zy}}$$

Apabila nilai t hitung > nilai t tabel maka terdapat pengaruh mediasi secara signifikan. Untuk mengetahui besarnya kuat-lemahnya pengaruh variabel X terhadap variabel Z melalui variabel Y

ditunjukkan dengan menjumlahkan Pengaruh Langsung (PL) dengan Pengaruh Tidak Langsung (PTL).



Gambar 3. Hubungan X terhadap Y dan implikasinya terhadap Z

Ketika koefisien jalur diuji secara keseluruhan dan terdapat variabel yang tidak signifikan maka dilakukan metode *trimming* dengan menghitung ulang koefisien jalur tanpa menyertakan variabel eksogen yang koefisien jalurnya tidak signifikan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini digolongkan berdasarkan jabatan, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan lama bekerja.

Tabel 1. Data Karakteristik Responden

No	Karakteristik Responden	Jumlah	Persentase
1.	<b>Responden Berdasarkan Jabatan</b>		
	Sekretaris	8	8%
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	21	21%
	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	20	20%
	Kasubag Keuangan & BMD	2	2%
	Kabid	9	9%
	Kasie	16	16%
	Pelaksana	24	24%
	<b>Jumlah</b>	100	100%
	2.	<b>Responden Berdasarkan Jenis Kelamin</b>	
Pria		63	63%
Wanita		37	37%
<b>Jumlah</b>		100	100%
3.	<b>Responden Berdasarkan Usia</b>		
	Kurang dari 25 tahun	0	0%
	25- 35 tahun	7	7%
	36 - 45 tahun	52	52%
	46 - 55 tahun	33	33%
	Lebih dari 55 tahun	8	8%
<b>Jumlah</b>	100	100%	
4.	<b>Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir</b>		
	Diploma III	6	6%
	Diploma IV atau S1	53	53%
	S2	36	36%
	S3	5	5%
	<b>Jumlah</b>	100	100%
5.	<b>Responden Berdasarkan Lama Bekerja</b>		
	Kurang dari 2 tahun	0	0%
	2- 5 tahun	7	7%
	Lebih dari 5 tahun	93	93%
	<b>Jumlah</b>	100	100%

#### 4.2 Hasil Pengujian Hipotesis (Analisis Jalur)

Hasil perhitungan koefisien jalur pada variabel X, Y, dan Z berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari analisis regresi substruktur 1 dan substruktur 2 serta hasil uji sobel dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel 2. Besaran pengaruh variabel X, Y, Z

Variabel	Pengaruh		Total	Keterangan
	Langsung	Tidak Langsung		
X terhadap Y	0,868	-	0,868	Sangat Kuat
Y terhadap Z	0,820	-	0,820	Sangat Kuat
X terhadap Z	0,070	-	0,070	Sangat Rendah
X terhadap Z melalui Y	-	0,070+(0,868 x 0,820)	0,781	Kuat

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara maturitas SPIP terhadap pelayanan publik melalui kinerja instansi pemerintah dengan total pengaruh sebesar 0,781.

#### 4.3 Pengaruh Maturitas SPIP Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t hitung  $17,305 > t$  tabel 1,984 artinya memiliki pengaruh yang positif dengan nilai sig.  $0,000 < 0,05$  artinya signifikan, maka disimpulkan bahwa maturitas SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Besarnya nilai koefisien jalur yaitu sebesar 0,868 dan berarah positif. Besarnya pengaruh maturitas SPIP terhadap kinerja instansi pemerintah di pemerintah daerah Kabupaten Garut adalah 75,3% sedangkan 24,7% dipengaruhi oleh variabel lain. Dari hasil penyebaran kuesioner, ketiga sub unsur maturitas SPIP memiliki pengaruh yang sangat baik dalam penerapannya di Pemerintah daerah Kabupaten Garut. Penelitian ini mendukung penelitian dari Junaedah (2019) dimana maturitas SPIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Dharmawan (2016) dimana terdapat pengaruh positif dari variabel independen sistem pengendalian internal terhadap variabel dependen yaitu kinerja instansi pemerintah.

#### 4.4 Pengaruh Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t hitung  $8,507 > t$  tabel 1,984 artinya memiliki pengaruh yang positif dengan nilai sig.  $0,000 < 0,05$  yang berarti signifikan, maka disimpulkan bahwa kinerja instansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan publik. Besarnya pengaruh pemahaman tentang kinerja instansi pemerintah terhadap pelayanan publik di pemerintah daerah Kabupaten Garut setelah dilakukan metode

*trimming* yaitu 77,6% yang mana sebelumnya besaran pengaruhnya adalah 67,24%, sedangkan 22,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Besarnya nilai koefisien jalur sebesar 0,881 dan berarah positif. Berdasarkan paparan jawaban responden mengenai kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Garut berada pada kategori sangat baik. Penelitian ini mendukung penelitian dari Hadian (2016) yaitu kinerja dinas-dinas Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat berpengaruh terhadap pelayanan publik dinas-dinas Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Nurbaeti (2019) bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pelayanan publik.

#### 4.5 Pengaruh Maturitas SPIP Terhadap Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t hitung  $0,727 < t$  tabel 1,984 artinya tidak memiliki pengaruh dengan nilai Sig.  $0,469 > 0,05$  yang berarti tidak signifikan, maka disimpulkan bahwa maturitas SPIP tidak berpengaruh signifikan terhadap pelayanan publik. Koefisien jalur sebesar 0,070 tergolong sangat rendah sehingga maturitas SPIP tidak memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi pelayanan publik tanpa adanya variabel intervening untuk memperkuat hubungan antara kedua variabel tersebut. Meskipun hubungan korelasi antara variabel maturitas SPIP terhadap pelayanan publik positif dan kuat, namun berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan uji analisis jalur maturitas SPIP tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap pelayanan publik. Sementara berdasarkan paparan jawaban responden mengenai maturitas SPIP dan pelayanan publik di Kabupaten Garut berada pada kategori sangat baik.

SPIP adalah merupakan suatu proses sedangkan maturitas SPIP adalah parameternya. Tidak di terimanya Hipotesis ketiga bisa terjadi karena indikator maturitas SPIP yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sub unsur dari SPIP yang lebih menekankan pada variabel kinerja instansi pemerintah daripada variabel pelayanan publik.

#### 4.6 Pengaruh Maturitas SPIP Terhadap Pelayanan Publik Melalui Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t hitung  $6,06 > t$  tabel 1,984 artinya memiliki pengaruh yang positif dengan nilai Sig.  $0,000 < 0,05$  yang berarti signifikan. Besarnya pengaruh dari maturitas SPIP terhadap kinerja instansi pemerintah serta implikasinya pada pelayanan publik adalah 58,3% dan sisanya 41,7% dipengaruhi oleh variabel lain. Besarnya pengaruh langsung ditunjukkan dengan

koefisien jalur sebesar 0,070 sementara pengaruh tidak langsung sebesar 0,764. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa  $PTL > PL$ . Kinerja instansi pemerintah sebagai variabel intervening untuk maturitas SPIP dan pelayanan publik memperkuat pengaruh yang sudah ada. Tingkat maturitas SPIP di pemerintah Kabupaten Garut menggambarkan bagaimana SPIP dapat mempercepat dan memperlancar tugas dan fungsi dari instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Tingginya tingkat maturitas SPIP akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah di pemerintah Kabupaten Garut, selanjutnya apabila kinerja instansi pemerintah sudah dilaksanakan secara baik maka akan menghasilkan pelayanan publik yang baik

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel maturitas SPIP berpengaruh positif terhadap variabel kinerja instansi pemerintah di pemerintah daerah Kabupaten Garut dan secara langsung maturitas SPIP terhadap kinerja instansi pemerintah berpengaruh sangat kuat.
2. Variabel kinerja instansi pemerintah berpengaruh positif terhadap variabel pelayanan publik di pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan secara langsung kinerja instansi pemerintah berpengaruh sangat kuat terhadap pelayanan publik.
3. Variabel maturitas SPIP tidak berpengaruh positif terhadap variabel pelayanan publik di pemerintah daerah Kabupaten Garut dan artinya maturitas SPIP tidak berpengaruh secara langsung terhadap pelayanan publik.
4. Variabel maturitas SPIP berpengaruh secara tidak langsung terhadap pelayanan publik dan menunjukkan bahwa maturitas SPIP berpengaruh sangat kuat terhadap pelayanan publik melalui kinerja instansi pemerintah.

### 5.2 Saran

#### 5.2.1 Saran untuk Akademisi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Menambahkan variabel independen lain.
2. Memperbanyak jumlah sampel baik dari segi responden maupun SKPD yang diteliti.
3. Memberikan kuesioner penelitian kepada responden yang memiliki pemahaman mendalam.

#### 5.2.2 Saran untuk Praktisi

Seluruh aparatur pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi dari SPIP, diharapkan level maturitas Kabupaten Garut dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi, karena dengan pengendalian intern yang berjalan baik akan menghasilkan kinerja instansi pemerintah yang baik pula sehingga pemberian pelayanan publik kepada masyarakat akan optimal.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya penelitian ini, penulis ingin berterimakasih kepada 25 SKPD di Kabupaten Garut, yang telah memberikan data dan informasi untuk menunjang penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- [2] Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018: Bappeda
- [3] Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2018: Bappeda
- [4] Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2017: Bappeda
- [5] Ombudsman RI Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat, "Catatan Akhir Tahun 2018 Ombudsman Jabar", 02 Januari 2019. [Online]. Tersedia: <http://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--catatan-akhir-tahun-2018-ombudsman-jabar>. [Diakses 23 September 2019]
- [6] G. Y. Putri, "Pengaruh Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)," Artikel, vol. 1, no. 1, p. 2, 2013.
- [7] Yasmin, "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pengukuran Kinerja Pemerintahan di Kabupaten Bandung [Internet]. Volume 4 Nomor 1 Halaman 101-116. Diterbitkan Juni 2018 P-ISSN: 2502-3020, E-ISSN: 2502-4159. Diunduh dari: <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe> [Diakses 10 November 2019]
- [8] Laporan Hasil Reviu atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Garut: Inspektorat Kabupaten Garut
- [9] REP -RILIS HUMAS PEMKAB GARUT, "Bupati Garut Kembali Singgung SPIP," JabarProv, 14 Agustus 2018. [Online]. Tersedia: <<https://jabarprov.go.id/index.php/news/29387/2018/08/14/Bupati-Garut-Kembali-Singgung-SPIP>>. [Diakses 23 September 2018]
- [10] Susanto, A. (2013). Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya.
- [11] Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2016
- [12] Moeheriono. (2014). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi* Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [13] Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

*Prosiding The 11<sup>th</sup> Industrial Research Workshop and National Seminar  
Bandung, 26-27 Agustus 2020*

- [14] Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*.  
Yogyakarta: ANDI.
- [15] Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*.

- Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [16] Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang  
Pelayanan Publik.